

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2018 - 2023

DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Nyi Ageng Karang Karanganyar Telp. (0271) 495925, 495141 Fax. 494705

Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : dishubpkp@karanganyarkab.go.id

Kode pos : 57711

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB	 I
PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang	1-1
B. Landasan Hukum	1-2
C. Maksud dan Tujuan	1-7
D. Sistematika Penulisan	1-8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KARANGANYAR	 II-1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2-1
B. Sumber Daya.....	2-5
C. Kinerja Pelayanan.....	2-10
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	2-15
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	 III-1
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi...	3-1
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar	3-3
C. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	3-9
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	3-31

E.	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	3-35
F.	Penentuan Isu-isu Strategis	3-37
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN		4-1
BABV STRATEGI DAN KEBIJAKAN		5-1
A.	Strategi.....	5-1
B.	Kebijakan	5-1
BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		IV-1
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.....	6-1
B.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6-1
C.	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6-1
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6-1
E.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	6-2
F.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	6-2
G.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	6-2
H.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	6-2
I.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6-2
K.	Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	6-3
L.	Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	6-3
M.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6-3
N.	Program Pengembangan Perumahan.....	6-3

O.	Program pengelolaan areal pemakaman	6-4
P.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6-4
BABVII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
BABVIII	PENUTUP	8-1
A.	Pedoman Transisi	8-1
B.	Kaidah Pelaksanaan	8-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018	2-7
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018	2-7
Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	2-8
Tabel 2.4. Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017	2-12
Tabel 2.5. Data Rambu-rambu Lalu lintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017	2-12
Tabel 2.6. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji, Trayek dan Kecelakaan Yang terjadi di Tahun 2013-2017.....	2-13
Tabel 2.7. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017.....	2-13
Tabel 2.8. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karanganyar	2-14
Tabel 2.9. Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2015-2018	2-14
Tabel 2.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.....	2-15
Tabel 2.11. Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	

Karanganyar	2
-15	
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	
3-3	
Tabel 3.2. Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar	3
-10	
Tabel 3.3. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan	
3-13	
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	3
-19	
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	
3-24	
Tabel 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	
3-26	
Tabel 3.7. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rencana Tata	

Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	3-34
Tabel 3.8. Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan	3-35
Tabel 3.9. Isu Strategis Standart Pelayanan Minimum	3-35
Tabel 3.10. Alternatif dan Rekomendasi Skenario Dengan Upaya Tambahan dan Rekomendasi Untuk Daya Dukung dan Daya Tampung	3-36
Tabel 3.11. Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	3-27
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	4 -1
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	5-2
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023	6-5
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023	7-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	2-2
Gambar 3.1. Peta Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

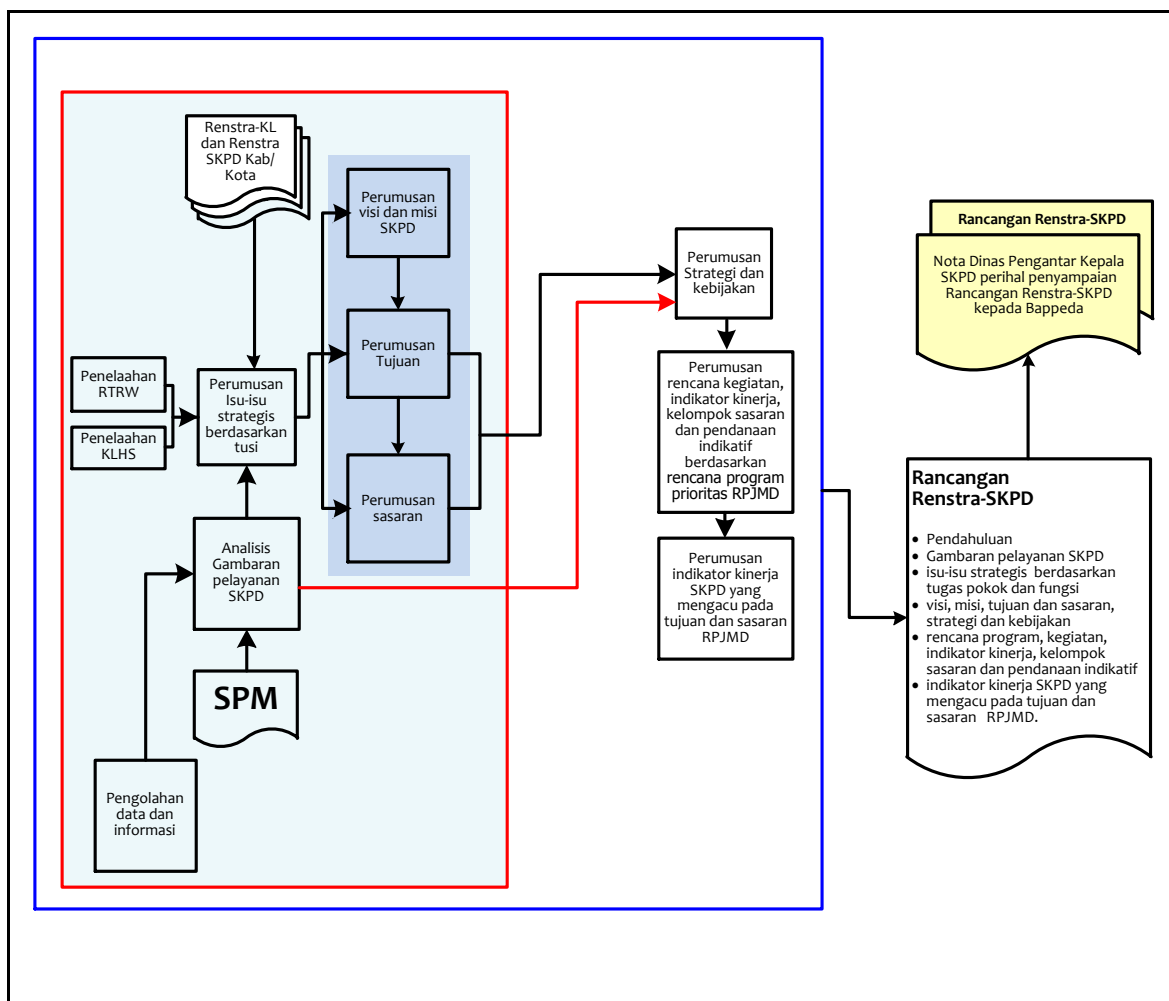
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Renstra Badan Pertanahan Nasional; renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, renstra Dinas Perumahan Rayat

dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; Renstra Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah dengan dengan Renja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar mengacu pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar; RPJMD Kabupaten Karanganyar, dan memperhatikan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Renstra Badan Pertanahan Nasional;
2. Penyusunan Renstra mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, renstra Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; Renstra Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.1

Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/prt/m/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 38/prt/m/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

37. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penjabaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman , adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung visi dan misi bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023

dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar;

Bab II **Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar**

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB III **Permasalahan dan Isu-Isu Strategis**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Renstra Badan Pertanahan Nasional; renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, renstra Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah; Renstra Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wikayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Karanganyar dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB V Strategi dan Kebijakan :

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KARANGANYAR

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

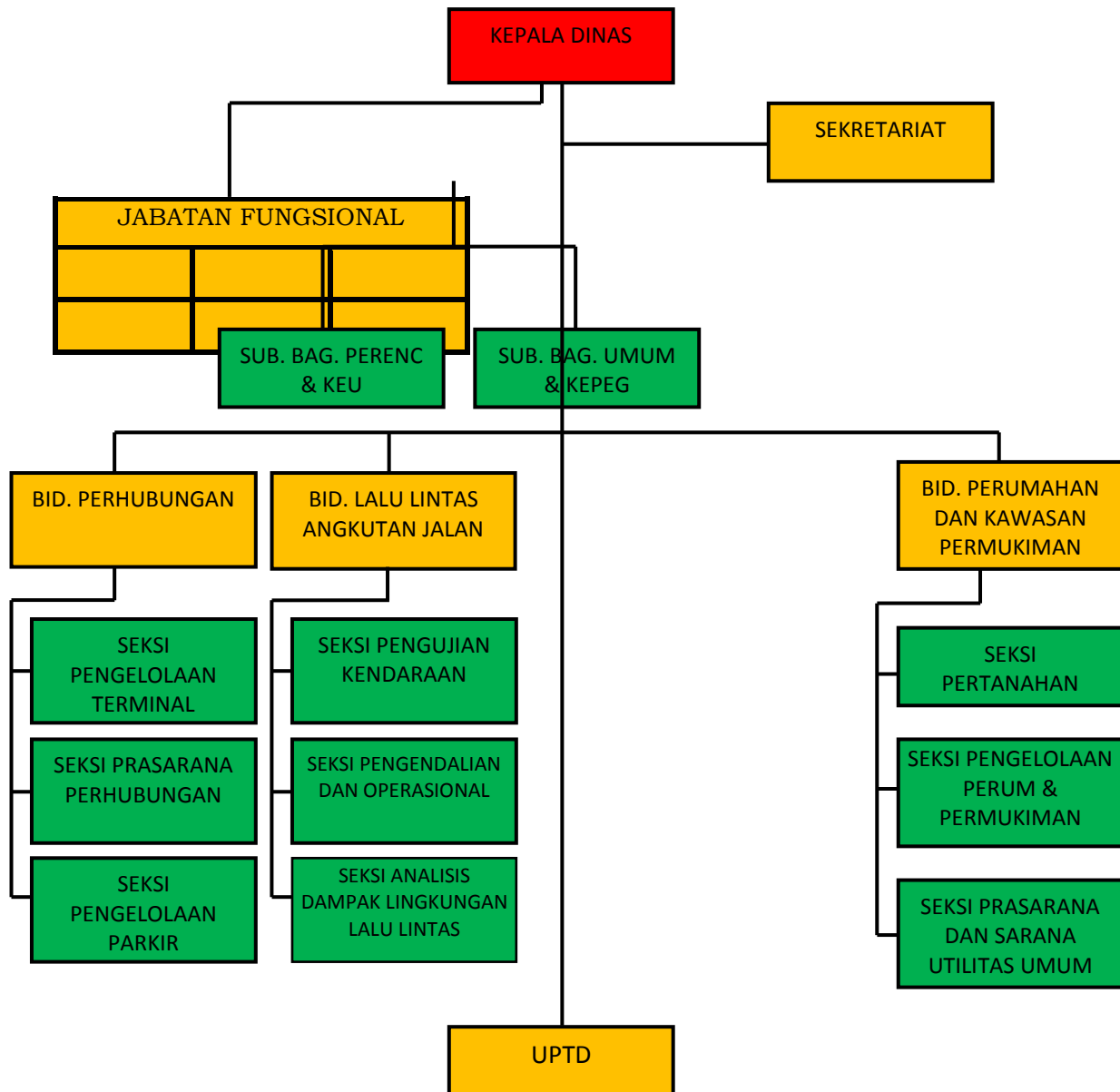
Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahkan :
 - 1) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan membawahkan :
 - 1) Seksi Pengelolaan Terminal;
 - 2) Seksi Prasarana Perhubungan;
 - 3) Seksi Pengelolaan Parkir.
- d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan membawahkan :
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - 3) Seksi Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas.
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahkan :
 - 1) Seksi Pertanahan;

- 2) Seksi Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;
 - 3) Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar

2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang meliputi perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan yang meliputi perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman bidang pertanahan serta kesekretariatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan serta kesekretariatan;
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan dan bidang perumahan dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan

ketatausahaan, hukum, keuangan, asset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian kegiatan;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi;
- 4) Pengkoordinasian tatalaksana;
- 5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pelaksanaan advokasi hukum;
- 7) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 8) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 10) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Perhubungan

Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas angkutan jalan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 2) Pelaksanaan kebijakan pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman;
- 4) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/ lembaga tersebut. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2019 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar memiliki data personil PNS dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya manusia sebanyak 198 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S2/ Magister	8	0	0	0	8
2	S1/ Sarjana	13	9	16	7	45
3	Diploma3	4	3	8	6	21
4	Diploma 2	0	0	1	0	1
5	Diploma 1	0	0	0	1	1
6	SMA/ Sederajat	39	3	55	7	104
7	SMP/ Sederajat	3	0	11	0	14
8	SD	1	0	3	0	4
	Jumlah Total	68	15	94	21	198

Sumber : Dishub PKP Kabupaten Karanganyar, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 4,04 % (8 orang); berpendidikan S1 sebesar 22,72 % (45 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 52,52 % (104 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan II sebanyak 41 orang, Golongan III sebanyak 32 orang dan golongan IV sebanyak 6 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	6	0	6
2	Golongan III	23	9	32
3	Golongan II	36	5	41
4	Golongan I	4	0	4
5	Non Golongan	94	21	115
	Jumlah	163	35	198

Sumber : Dishub PKP Kabupaten Karanganyar, 2019

2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar keadaan bulan Desember 2018 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
A	Barang Tak Bergerak				
1	Tanah/Bangunan Terminal/kantor/lapangan	Bidang	19	0	19
2	Gedung Kantor Permanen	Unit	18	0	18
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Unit	6	0	6
4	Tempat Ibadah Permanen	Unit	3	0	3
5	Ged.Pertokoan/Kop/Ps	Unit	4	0	4
6	Bangunan Ged. Pertokoan Lainnya	Unit	1	0	1
7	Ged. Pos Jaga	Unit	3	0	3
8	Ged Grs/Pool Sp	Unit	3	0	3
9	Halte Bus	Unit	2	0	2
10	Ged.Terminal	Unit	11	0	11
11	Bang.Ged.Terminal	Unit	21	0	21

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
12	Bang.Pengujian Kelaikan Lain	Unit	1	0	1
13	Ged.tmp.kerja lainnya	Unit	2	0	2
14	Air Mancur	Unit	1	0	1
15	Monumen				
	• Tugu Pembangunan	Unit	1	0	1
	• Tugu / Tanda Batas	Unit	1	0	1
	• Traffic light	Unit	6	0	6
	• Lampu flashing	Unit	7	0	7
	• Rambu	Unit	10	0	10
	• Traffic Cone	Unit	25	0	25
	• RPPJ	Unit	6	0	6
B	Barang Bergerak				
1	Alat-alat Angkutan				
	• Station wagon / pick up/ lainnya	Unit	9	0	9
	• Sepeda Motor	Unit	18	0	18
	• Motor Roda 3	Unit	3	0	3
2	Alat angkut non motor			0	
	• Gerobag Dorong	Unit	16	0	16
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
	• Mesin Tik Man (11-13)	Unit	7	0	7
	• Mesin Tik Man Long (18)	Unit	3	0	3
	• Almari Besi/Metal	Buah	12	0	12
	• Rak kayu	Buah	2	0	2
	• Filing Besi /Metal	Buah	14	0	14
	• Buffet	Buah	2	0	2
	• Papan pengumuman	Buah	12	0	12
	• Papan tulis/white board	Buah	2	0	2
	• Peta	Buah	1	0	1
	• Display	Buah	1	0	1
	• Lemari Kayu	Buah	5	0	5
	• Rak kayu	Buah	3	0	3
	• Meja Kayu/Rotan	Buah	20	0	20
	• Kursi Besi /metal	Buah	31	0	31
	• Meja tulis	Buah	27	0	27
	• Meja Panjang	Buah	5	0	5
	• Meja Bundar	Buah	1	0	1
	• Kursi Tamu	Buah	7	0	7

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Kursi Putar	Buah	4	0	4
	• Kursi biasa	Buah	50	0	50
	• Bangku tunggu	Buah	1	0	1
	• Kursi lipat	Buah	50	0	50
	• Meja Komputer	Buah	13	0	13
	• Meja ½ Biro	Buah	50	0	50
	• Sofa	Unit	1	0	1
	• Mebelair lainnya	Unit	4	0	4
	• Lampu Lalu lintas	Unit	1	0	1
	• Alat pembersih lainnya	Buah	1	0	1
	• Lemari Es	Buah	2	0	2
	• AC Unit	Buah	12	0	12
	• Kipas Angin	Buah	23	0	23
	• Televisi	Buah	4	0	4
	• Cassete Recorder	Buah	1	0	1
	• Amplifier	Buah	3	0	3
	• Loudspeaker	Buah	2	0	2
	• Wireless	Buah	1	0	1
	• Megaphone	Buah	2	0	2
	• Microphone	Buah	12	0	12
	• Unit Power Supply	Unit	20	0	20
	• Camera Film	Buah	6	0	6
	• Handy cam	Buah	4	0	4
	• Komputer unit/jaringan lainnya	Unit	4	0	4
	• PC	Unit	27	0	27
	• Laptop	Buah	12	0	12
	• Notebook	Buah	7	0	7
	• Harddisk	Buah	5	0	5
	• Printer	Buah	20	0	20
	• CPU	Buah	1	0	1
	• Monitor	Buah	3	0	3
	• Meja Kerja Pejabat Eselon III + II	Buah	10	0	10
	• Mobile File	Buah	4	0	4
	• Pesawat telepon PABX	Unit	1	0	1
	• Faximile	Unit	1	0	1
	• Generating set portable	Unit	3	0	3
	• Pompa Air	Unit	2	0	2
	• Lain (AC Mobil AD 87 F)	Unit	1	0	1

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Alat Pengukur kegelapan kaca	Unit	2	0	2
	• Alat Ukur Universal (GPS)	Unit	6	0	6
	• Alat pengukur garis tengah	Unit	1	0	1
	• Alat ukur ban	Unit	2	0	2
	• Alat ukur lainnya	Unit	1	0	1
	• Alat penghancur kertas	Unit	1	0	1
	• Over head Proyektor	Unit	2	0	2
	• Pengukur dimensi	Unit	1	0	1
	• Alat pengukur angka dan kotak segel	Unit	1	0	1
	• Alat penunjuk arah	Unit	2	0	2
	• Meja Panjang	Buah	5	0	5
	• Meja Pelayanan Perijinan	Buah	1	0	1
	• Kursi Rapat	Buah	120	0	120
	• Chain Saw	Unit	2	0	2
	• Mesin Penghisap Debu	Unit	1	0	1
	• Mesin pemotong rumput	Unit	11	0	11
	• Dipenser	Unit	3	0	3
	• Handycam	Unit	3	0	3
	• Alat pemadam Portable	Buah	12	0	12
	• Suku cadang perangkat computer	Unit	1	0	1
	• Personal komputer lainnya	Unit	5	0	5
	• Tablet	Unit	3	0	3
	• Scanner	Unit	1	0	1
	• Managable swich	Unit	1	0	1
	• Camera attachment	Unit	6	0	6
	• Amplifier horn	Unit	1	0	1
	• Power amplifier	Unit	2	0	2
	• Talkshow desk	Unit	1	0	1
	• Build up prosesor	Unit	1	0	1
	• Mixer	Unit	1	0	1
	• Peredam ruangan	Unit	1	0	1
	• Off air monitor	Unit	2	0	2
	• Video monitor cctv	Unit	1	0	1
	• Power suplly	Unit	1	0	1
	• Tripot camera	Unit	2	0	2
	• Lensa camera	Unit	2	0	2
	• Sound system	Unit	2	0	2

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	• Tape recorder	Unit	2	0	2
	• Handy Talky	Unit	15	0	15
	• Intercome	Unit	1	0	1
	• Unit Pemancar Vhf/FM	Unit	3	0	3
	• Switches/menara antena/Spinner	Unit	2	0	2
	• Memory camera foto	Unit	2	0	2
	• Memory video	Unit	1	0	1
	• Batery handycam	Buah	1	0	1
	• Ac Floor Standing	Unit	1	0	1
	Jumlah		941	0	941

Sumber : Dishub PKP Kab. Karanganyar, 2018

C. Kinerja Pelayanan

Pelayanan urusan perhubungan di Kabupaten Karanganyar berupa perhubungan darat, yang meliputi: angkutan darat dan angkutan kereta api. Untuk angkutan darat di Kabupaten Karanganyar berupa terminal tipe B ada 3 buah (terminal Matesih, Tawangmangu dan Karanganyar), terminal tipe C ada 8 buah (Karangpandan, Tuban, Jungke, Jumapolo, Jatipuro, Jambangan, Jenawi dan Kemuning).

Tabel 2.4
Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

No	Terminal	Lokasi	Kondisi
1	Terminal Gondangrejo	Gondangrejo	Kurang Baik
2	Terminal Palur	Palur	Kurang Baik
3	Terminal Jungke	Jungke	Kurang Baik
4	Terminal Matesih	Matesih	Tidak Baik (Bangunan Terminal Tidak Ada)
5	Terminal Karangpandan	Karangpandan	Kurang Baik
6	Terminal Ngargoyoso	Ngargoyoso	Kurang baik
7	Terminal Jambangan	Jambangan	Kurang Baik
8	Terminal Jenawi	Jenawi	Kurang Baik
9	Terminal Jumapolo	Jumapolo	Kurang baik
10	Terminal Jatipuro	Jatipuro	Kurang baik

Sumber : Dishubpkp, 2018

Guna mendukung keselamatan lalu lintas, maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Karanganyar,

yang terdiri antara lain rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), *guardrail*, dan marka jalan. Data Rambu-rambu Lalu Lintas yang tidak berfungsi dan kebutuhan rambu lalu-lintas Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2017, selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.5
Data Rambu-rambu Lalulintas Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Berfungsi Baik (unit)	155	233	443	464	653
2	Tidak berfungsi (Rusak) unit	55	62	62	81	52
3	Kebutuhan (unit/ meter)	600	600	600	600	800
4	Persentase Ketersediaan Rambu	25,83	38,83	73,83	77,83	81,63

Sumber : Dishubpkp, 2018

Data jumlah kendaraan bermotor yang diuji berdasarkan ketentuan wajib bayar dan beban biaya uji keadaan tahun 2013-2017 terdapat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Diuji, Trayek dan Kecelakaan Yang terjadi di Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kendaraan yang diuji (unit)	Na	14.580	15.142	15.350	17.654
3	Jumlah kendaraan Wajib Uji (unit)	NA	855	8885	9085	9091
2	Jumlah Trayek (A-Q dan Perdesaan)	17	17	17	17	17
3	Jumlah kecelakaan lalulintas (kali)	Na	Na	907	1.287	1.181

Sumber : Dishubpkp, 2018

Menurut Kasatlantas Polres Karanganyar, AKP Fariz Budiman mengatakan, Karanganyar termasuk 10 besar wilayah dengan korban kecelakaan tertinggi di jajaran Polda Jateng. Sebagian besar korban adalah milenial, anak muda usia 15-17 tahun. Pada tahun 2018, rata-rata setiap hari ada satu korban kecelakaan meninggal dunia, satu luka berat dan lima orang luka ringan. Berikut data kejadian kecelakaan lalu

lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.7
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Kecelakaan	NA	NA	699	1014	941
2	Jumlah Korban Meninggal	NA	NA	11	28	37
3	Jumlah Korban Luka Berat	NA	NA	42	70	60
4	Jumlah Luka Ringan	NA	NA	864	1.287	1.181

Sumber : Dishubpkp, 2018

Menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi permasalahan pemerintah dan instansi terkait lainnya. Dilansir dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2015, masih terdapat sekitar 3 juta unit rumah di Indonesia yang tergolong tidak layak huni. Rumah bisa dikatakan layak huni apabila memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan tempat tinggal, maka Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan urusan perumahan. Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang perlu ditangani di Kabupaten Karanganyar, selengkapnya dapat dilihat seperti pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Karanganyar

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah RTLH (unit)	Na	Na	14.935	14.402	13.891
Rasio RTLH	Na	Na	0,067	0,066	0,064
Jumlah Rumah Yang ditangani (dibangun)	Na	Na	533	511	1.457
Sisa RTLH	Na	Na	14.402	13.891	12.434
Kawasan Kumuh (Ha)	Na	Na	Na	100,16	83,72

Sumber : Dishub PKP Kab. Karanganyar, 2018

Pemerintah Kabupaten Karanganyar selama 5 tahun terakhir ini berusaha menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan memenuhi kebutuhan rumah layak huni yang anggarannya bersumber pada berbagai instansi seperti dari APBD Kabupaten; APBD

Provinsi maupun anggaran dari Pemerintah Pusat. Penurunan jumlah RTLH dapat dilihat pada tahun 2015 sebanyak 14.935 unit, pada tahun 2018 menjadi 11.666 unit.

Tabel 2.9
Sumber Dana Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jml Awal (unit)	Sumber Dana (unit)					
			APBD Kab	APBD Prov	BSPS	Kemensos	Jumlah	Sisa
1	2013	Na	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	2014	Na	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	2015	14.935	420	NA	NA	113	533	14.402
4	2016	14.402	291	220	NA	NA	511	13.891
5	2017	13.891	570	220	667	NA	1.457	12.434
6	2018	12.434	210	100	458	NA	768	11.666

Sumber : Dishub PKP, 2018

Tabel 2.10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018

Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahun 2014-2018					Realisasi Kinerja Tahun 2014-2018					Rasio antara Realisasi dan Target Tahun 2014-2018				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	218	2014	2015	2016	2017	2018
Prosentase (%) Penurunan Angka Kecelakaan pada Lalu Lintas	NA	NA	NA	8,00	9,00	NA	NA	NA	7,00	9,98	NA	NA	NA	87,50	110,89
Prosentase Rumah tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani	NA	NA	NA	90,00	100,00	NA	NA	NA	85,00	57,25	NA	NA	NA	94,44	57,25
Prosentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10,00	11,00	12,00	14,00	15,00	10,600	10,600	10,600	10,6	10,6	106,00	96,36	88,33	75,71	70,67

Tabel 2.11
Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar

Uraian	Target Anggaran Tahun 2017-2018 (Rp.000)		Realisasi Anggaran Tahun 2017-2018 (Rp.000)		Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2018		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	218	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	1.835.277	1.828.639	1.722.214	1.901.625	93,84	103,99	(0,18)	5,08
Belanja Tidak Langsung	9.530.548	7.237.769	6.686.036	6.582.344	70,15	90,94	(12,85)	(0,78)
Belanja Langsung	19.599.492	10.316.323	4.718.679	9.707.832	24,08	94,10	(27,45)	43,43
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	384.450	461.000	293.193	424.580	76,26	92,10	9,50	20,34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	164.025	217.000	82.139	211.033	50,08	97,25	15,02	60,29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0,00	15.000	0,00	14.999	-	99,99	NA	NA

Uraian	Target Anggaran Tahun 2017-2018 (Rp.000)		Realisasi Anggaran Tahun 2017-2018 (Rp.000)		Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2018		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	218	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	174.750	270.000	153.375	256.006	87,77	94,82	24,30	29,20
Program Pembangunan prasarana dan Fasilitas Perhubungan	324.250	424.540	279.201	416.610	86,11	98,13	14,42	22,15
Program Perumahan	0	65.000	0	58.621	-	90,19	NA	NA
Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	275000	82000	27.297	61.179	9,93	74,61	(45,39)	49,71
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	289.100	328.000	219.525	324.801	75,93	99,02	6,52	21,64
Program peningkatan pelayanan angkutan	355.510	478000	332.605	473.117	93,56	98,98	15,95	19,27
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	3.136.550	170.000	786.694	168.997	25,08	99,41	(76,72)	(53,65)
Program pengelolaan areal pemakaman	214.200	60.000	50.366	59.881	23,51	99,80	(47,07)	9,04
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	600.000	1.240.000	150.335	1.224.370	25,06	98,74	43,76	185,38
Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas	280.000	545.000	199.250	507.867	71,16	93,19	39,51	59,65
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	962.800	1.105.000	857.725	1.095.651	89,09	99,15	7,13	13,02
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman	12.686.357	4.705.783	1.291.971	4.296.373	10,18	91,30	(39,10)	82,36
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	0	150.000	0	113.742	-!	75,83	NA	NA

Sumber: Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Karanganyar, 2019

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karanganyar dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Tantangan

- a. Tuntutan dalam penyediaan transportasi yang murah, nyaman, tepat waktu dan dapat diakses oleh semua kalangan serta terkoneksi dengan jenis moda transportasi lainnya;
- b. Perkembangan teknologi yang semakin cepat dan fenomena maraknya transportasi on line;
- c. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berdisiplin lalu lintas sehingga menyebabkan angka kecelakaan yang cukup tinggi;
- e. Rendahnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan perumahan;
- f. Meningkatnya kebutuhan rumah layak huni dan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang baik

2. Peluang

- a. Tuntutan *transport demand*, membuka peluang untuk mengembangkan antarmoda/multimoda yang terintegrasi dan terkoneksi dengan melakukan pengembangan terminal bus perkotaan, perdesaan dan AKDP;

- b. Tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan anggaran bantuan keuangan Provinsi dan DAK untuk penyelenggaraan perumahan dan permukiman di daerah;
- c. Keberadaaan pihak swasta/ pengembang yang berperan serta dalam penyediaan/ pemenuhan perumahan bagi masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
3. Belum optimalnya kualitas dokumen perancahan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Permasalahan Bidang Perhubungan

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit);
- b. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan parkir;
- d. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono;

3. Permasalahan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian;
- b. Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan;

- c. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas;
- d. Kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi pada saat libur panjang;
- e. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, tahun 2017 rambu-rambu lalulintas yang rusak/ tidak berfungsi sebanyak 52 unit, sedangkan kebutuhan sebanyak 229 unit;
- f. Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2017 angka pelanggaran/kecelakaan lalulintas sebesar 1.181 kasus;
- g. Banyaknya perlintasan rel kereta api yang tidak berpalang pintu, sebanyak 24 lokasi.

4. Permasalahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Penanganan kawasan kumuh belum optimal, diketahui luasan kawasan kumuh pada tahun 2017 masih sebesar 59,7 Ha;
- b. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH), tahun 2017 masih 13.891 unit;
- c. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni;
- d. Mahalnya harga lahan, sehingga berpengaruh terhadap harga perumahan dan kemampuan masyarakat;
- e. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan/ permukiman;
- f. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan/ permukiman sehingga berpotensi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru di perkotaan;
- g. Belum optimalnya penanganan rehabilitasi bagi rumah korban bencana;
- h. Belum optimalnya penyediaan pengelolaan RTH di lingkungan perumahan/ permukiman;

- i. Belum semua bidang tanah Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersertifikat (capaian tanah yang belum bersertifikat tahun 2017 sebesar 49,19% atau sebesar 706 bidang).

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dan SDM secara kualitas dan kuantitas, khususnya SDM perhubungan dan teknis perumahan	Kapasitas SDM perhubungan dan teknis perumahan yang masih kurang serta gedung kantor yang tidak sesuai standart
		Turunnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	• Belum optimalnya penyediaan transportasi massa yang murah, nyaman dan terkoneksi; • Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang kurang optimal;
		Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Karanganyar	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalulintas; • Kurangnya penyediaan fasilitas perlengkapan perhubungan (sarana dan prasarana perhubungan)
		Masih terdapat kawasan	• Penanganan kawasan kumuh belum optimal;

		kumuh di Kabupaten Karanganyar	• Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum (PSU) di perumahan dan lingkungan permukiman
		Masih terdapat RTLH di Kabupaten Karanganyar	• Belum optimalnya penanganan RTLH; • Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni
		Masih rendahnya PSU perumahan yang belum bersertifikat	• Penegakan hukum atas pelanggaran perda PSU perumahan belum optimal; • Kesadaran pengembag perumahan dalam mengurus sertifikat PSU rendah; • Kurangnya koordinasi pemerintah dengan stakeholder terkait penyediaan perumahan (pengembang)

Sumber: Hasil Anilisis, 2019

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati/ Wakil Bupati Karanganyar

Visi Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih periode tahun 2018-2023 dalam RPJMD adalah:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan

potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang

menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

1. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
2. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
3. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
4. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil

atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur

menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak

pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus

dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu: **Pembangunan Infrastruktur Yang Menyeluruh**. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah: ***Terwujudnya infrastruktur menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan*** dengan sasaran:

- a. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah;**
- b. Meningkatnya lingkungan permukiman dan fasilitas publik yang manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan hidup sehat.**

Faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar dan Wakil Bupati Karanganyar

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh Tujuan : Terwujudnya infrastruktur menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Sasaran : a. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah; b. Meningkatnya lingkungan permukiman dan fasilitas publik yang manusiawi, berkeadilan dan berwawasan lingkungan hidup sehat	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang perhubungan dan perumahan permukiman; 3. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 4. Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas; 5. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni; 6. Mahalnya harga lahan, sehingga berpengaruh terhadap harga perumahan dan kemampuan masyarakat; 7. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan/permukiman;	1. Kebutuhan SDM 2. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi; 3. Belum optimalnya pelayanan angkutan darat; 4. Permintaan rumah yang semakin meningkat dengan lahan terbatas; 5. Keterbatasan anggaran; 6. Rendahnya partisipasi publik dalam upaya pemenuhan pelayanan perumahan di masyarakat.	1. Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 2. Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; 3. Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang lebih baik; 4. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ; 5. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten 6. Peraturanperundangan-undangan yang jelas

C. Telaahan Renstra Kementerian dan RenstraProvinsi

1. Telaah Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

- 1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- 2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

b. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

- 1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- 2) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance;
- 5) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- 6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- 7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

c. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

- 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- 2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- 3) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- 4) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diatas, Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa faktor pengambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan

Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi: 1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi; 2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;	Kurang Optimalnya Pelayanan Perhubungan	• Banyak rambu yang hilang/rusak • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas • Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan • Masih tingginya muatan lebih pada angkutan barang di Jalan. • Kurang disiplinnya awak kendaraan umum dan pengguna jalan	• Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang baik; • Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi
B. Pelayanan Transportasi Aspek pelayanan transportasi, meliputi: 1. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi; 2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan; 3. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan; 4. Meningkatkan kinerja capaian Kementerian Perhubungan	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; 2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usia peralatan pengujian; 4. Kurangnya kesadaran wajib uji kendaraan yang tidak melakukan uji kendaraan;	• Kurangnya SDM bidang perhubungan secara kualitas dan kuantitas • Masih banyak pemilik Kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji • Adanya angkutan penumpang umum dan barang tidak laik jalan • Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan	• Ada upaya pemenuhan kebutuhan SDM dengan sistem kontrak; • Adanya sidak uji kelaikan angkutan barang/ orang; • Dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana yang layak.

Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
dalam mewujudkan <i>good governance</i>; 5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan; 6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; 7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan <i>clean governance</i>;			
C. Kapasitas Transportasi Aspek kapasitas transportasi, meliputi : 1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda; 2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang; 3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan,	1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan; 2. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; 3. Kemacetan lalu lintas yang cukup tinggi pada saat libur panjang;	• Kurangnya angkutan umum yang layak sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat. • Belum optimalnya jaringan trayek	• Tingginya permintaan masyarakat terhadap angkutan umum masal yang murah dan nyaman; • Dukungan anggaran dan komitmen pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak

Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia; 4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; 5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.			

2. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan sebuah visi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk tahun 2015-2019. Visi tersebut yaitu:

"Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 5 misi yaitu :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
- c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran di dukung industri konstruksi yang berkualitas
- e. Untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
- f. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang

terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Dengan memperhatikan visi misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar mengarah dan ikut mendukung pencapaian misi Kementerian, sebagai berikut:

Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.

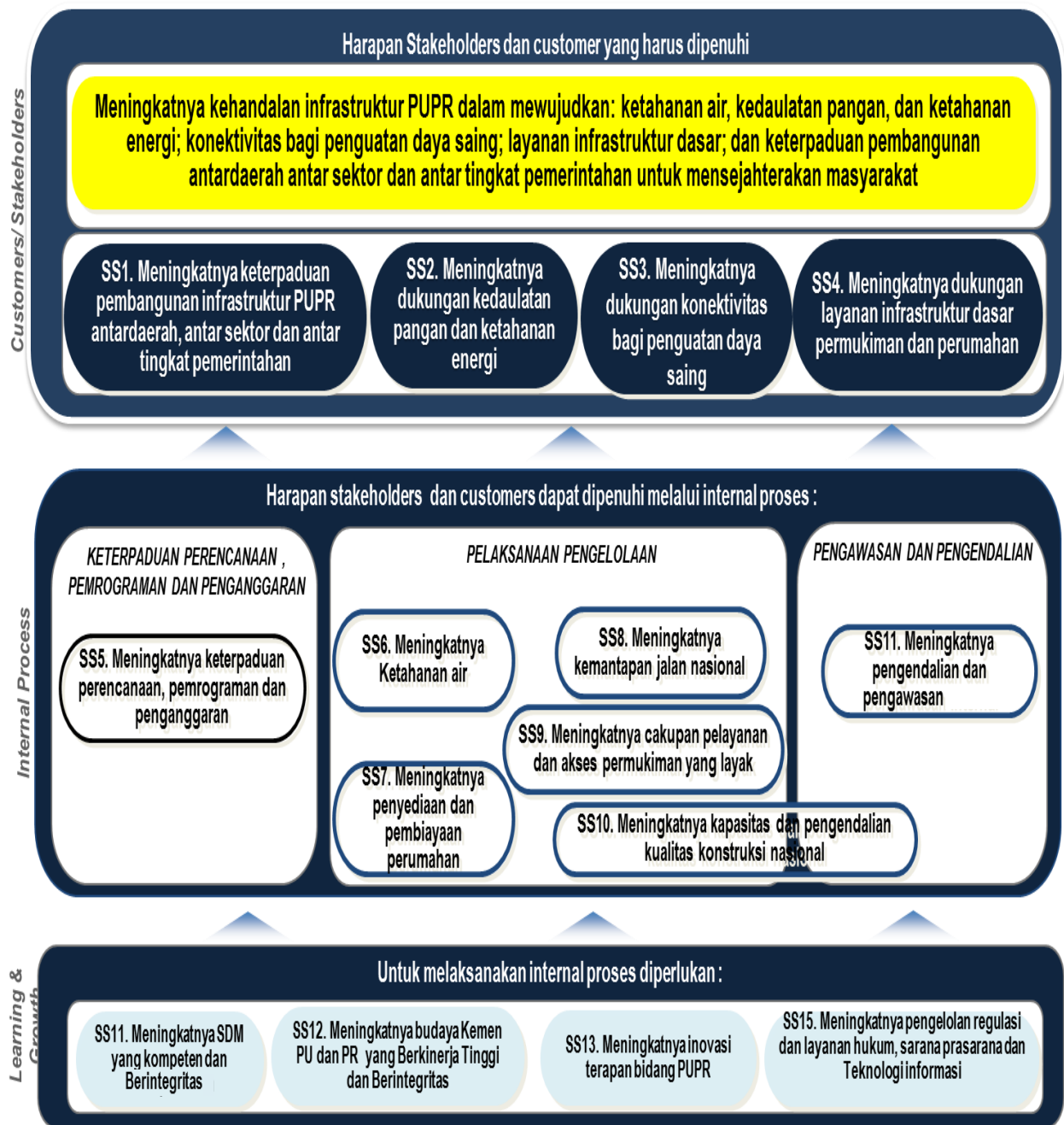
Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan

- rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
- b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
2. Tujuan 2 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
- a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
 - b. Meningkatnya ketahanan air.
3. Tujuan 3 : Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
- a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
 - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
4. Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:
- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;

- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
 - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
5. Tujuan 5 : Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
- a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan;
 - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas;
 - c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas;
 - d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana.

Peta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1 Peta Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berikut ditampilkan permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PU & PR	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan	1. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan; 2. Kurangnya prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan;	Belum ada peraturan pengelolaan PSU	1. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen ; 2. Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten
2	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;	Belum optimalnya penanganan PSU kawasan permukiman	Keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan bidang perumahan dan permukiman	Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain.
3	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	1. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni; 2. Mahalnya harga lahan yang ikut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak; 3. Belum ada kajian kebutuhan rusun untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Belum tertanganinya permasalahan kebutuhan rumah (backlog), besarnya rumah tidak layak huni dan besarnya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan daerah	Investasi di bidang properti yang cukup tinggi.

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3. Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mengacu pada arahan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yaitu:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Untuk mencapai perwujudan visi di atas, telah dirumuskan 5 misi yaitu :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkanmasyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkankualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkanindonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
- g. Mewujudkan masyarakat yangberkepribadian dalamkebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan,Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuanutama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

- a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
 - 2) Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria
- b. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran:
 - 1) Persentase peninglatan kesesuaia rencana program pembangunan sector dengan rencana tata ruang;
 - 2) Peningkatan tertib tata ruang dan penugasan tanah.
- c. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan(sengketa, konflik, dan perkara), dengan indicator:
 - 1) Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan;
 - 2) Persentase cakupan peta dasar pertanahan;
 - 3) Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar

4. Telaah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung capaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, tolerandan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yaang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/ Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu **Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota** dengan program kerja ke-7 Pengembangan Transportasi Massal, Revitalisasi Jalur Kereta dan Bandara serta Pembangunan Embung/ Irigasi.

Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perhubungan dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan: Pemantapan system transportasi yang berorientasi pada konektivitas antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan indicator: Persentase pelayanan transportasi antar kawasan pengembangan di Provinsi Jawa Tengah.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 1.1. Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang, dengan indikator sasaran: Persentase layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang.
- 1.2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi;
- 1.3. Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan umum aglomerasi, dengan indikator sasaran: Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam fasilitasi Revitalisasi Kereta Api, Pengembangan Pelabuhan dan pengembangan Bandar Udara;
2. Mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAUM (Sistem Angkutan Umum Massal) yang

terintegrasi dengan aglomerasi pengembangan Kawasan Strategis Wilayah;

3. Pengembangan kualitas dan kuantitas SDM bidang perhubungan;
4. Peningkatan PAD dengan konsep KPBU;
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung wilayah pengembangan kawasan strategis, KSPN dan KSP di Jawa Tengah;
6. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terkait sarana dan prasarana serta pelayanan di Bidang Perhubungan;
7. Peningkatan fasilitas keselamatan jalan, fasilitas keselamatan ASDP fasilitas penunjang keselamatan perlintasan KA, dan fasilitas keselamatan pelayaran;
8. Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan urusan perhubungan dan keselamatan;
9. Mengembangkan Angkutan Masal yang berbasis *sustainable transport*;
10. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung berbasis IT;
11. Sosialisasi Keselamatan Kawasan Keselamatan operasional Penerbangan;
12. Pengendalian lalu lintas, Pengawasan angkutan jalan, Koordinasi Simpang dengan ATCS dan rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jawa Tengah;
13. Melakukan koordinasi Forum antar lintas sector;
14. Penilaian WTN 35 Kabupaten/ kota serta Pembentukan kelompok masyarakat sadar keselamatan.

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terjaminnya layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang	a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit); b. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terimal Mojogedang dan Terminal Jumantono;	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman
m2	Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi, dengan indikator sasaran: Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi;	a. Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian yang ada, karena faktor usi peralatan pengujian; b. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, tahun 2017 rambu-rambu lalu lintas yang rusak/ tidak berfungsi sebanyak 52 unit, sedangkan kebutuhan sebanyak 229 unit; c. Banyaknya perlintasan rel kereta api yang tidak berpalang pintu, sebanyak 24 lokasi.	• Banyak rambu yang hilang/rusak • Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan memelihara rambu-rambu lalu lintas; • Kurangnya koordinasi dengan PT KAI terkait tanggung jawab terhadap perlintasan rel kereta api	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Dorongan masyarakat agar dilakukan pemasangan palang pintu perlintasan rel kereta api; • Dukungan DPRD untuk berkoordinasi bersama dengan PT KAI terkait pengadaan perlintasan rel kereta api.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya kenyamanan dan kehandalan angkutan umum aglomerasi, dengan indikator sasaran: Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal.	a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit); b. Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; c. Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono;	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman

Sumber: Hasil Analisis, 2019

5. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mendukung capaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu:

"Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera (tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, tolerandan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan RepublikIndonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yaang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/ Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mendukung pencapaian misi ke-3 yaitu ***Memperkuat ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk kemiskinan dan pengangguran*** dengan fokus pada peningkatan kualitas rumah dengan rumah layak huni serta memfasilitasi akses terhadap pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang miskin dan masyarakat *Non Bankable*.

Tujuan, sasaran dan indikator Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mencapai visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan 1:** Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas.

Dengan indikator:

- a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak;
- b. Persentase kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 1.1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni, dengan indikator sasaran: Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni.
- 1.2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator sasaran: Persentase penurunan kawasan kumuh.
2. **Tujuan 2:** Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan indikator: Persentase kepastian hukum atas bidang tanah.

Sasaran dari tujuan tersebut adalah:

- 2.1. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan indikator sasaran: Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan rumah menjadi layak huni, sehat dan berwawasan lingkungan;
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan;
3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan perumahan;
4. Pengurangan Kawasan Kumuh;
5. Pengembangan PSU;
6. Peningkatan kapasitas SDM penanganan kawasan permukiman;
7. Peningkatan keterpaduan penyelenggaraan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
8. Peningkatan tertib administrasi pertanahan;
9. Penanganan permasalahan pertanahan;

10. Peningkatan kapasitas masyarakat

Berikut permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar berdasarkan sasaran strategis renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan tupoksi dinas beserta faktor penghambat dan pendorong:

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya jumlah rumah layak huni, dengan indikator sasaran: Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni.	a. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH), tahun 2017 masih 13.891 unit; b. Mahalnya harga lahan, sehingga berpengaruh terhadap harga perumahan dan kemampuan masyarakat; c. Belum optimalnya penanganan rehabilitasi bagi rumah korban bencana;	• Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni;	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat; • Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain.
2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman, dengan indikator sasaran: Persentase penurunan kawasan kumuh.	a. Penanganan kawasan kumuh belum optimal, diketahui luasan kawasan kumuh pada tahun 2017 masih sebesar 59,7 Ha; b. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan/ permukiman; c. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan/ permukiman sehingga berpotensi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru di perkotaan;	• Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni; • Belum terintegrasinya PSU di kawasan permukiman secara menyeluruh.	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat; • Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain; • Kebijakan nasional 100-0-100 dalam percepatan penanganan kawasan kumuh

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Karanganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		d. Belum optimalnya penyediaan pengelolaan RTH di lingkungan perumahan/ permukiman;		
3	Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk Kepentingan Umum, dengan indikator sasaran: Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.	Belum semua bidang tanah Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersertifikat (capaian tanah yang belum bersertifikat tahun 2017 sebesar 49,19% atau sebesar 706 bidang).	Kurangnya tertib administrasi terhadap aset pertanahan milik daerah	- Komitmen pemerintah daerah untuk upaya melakukan sertifikasi tanah; - Dukungan dan koordinasi BPN untuk melakukan sertifikasi tanah milik daerah.

Sumber: Hasil Analisis, 2019

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan urusan Perhubungan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman. RTRW Kabupaten Karanganyar 2011-2031 bertujuan mewujudkan Kabupaten Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat sebagai daerah perbatasan Jawa Tengah di bagian Timur melalui pengembangan potensi kegiatan utama industri, pertanian, dan pariwisata, dengan mengedepankan keseimbangan pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih pada penyediaan infrastruktur wilayah yang mengarah pada penyelenggaraan urusan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan. Lebih lanjut tujuan penataan ruang di Kabupaten Karanganyar dalam RTRW 2013-2032 diterjemahkan dalam 12 poin kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

1. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas;
2. Pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain;
3. Pemantapan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan;
4. Pemantapan kawasan pertanian terpadu;

5. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;
6. Pengembangan industri berbasis potensi lokal;
7. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan pertanian;
8. Pengembangan dan pemantapan sistem prasarana energi, telematika atau telekomunikasi, sumber daya air dan penyehatan lingkungan sebagai prioritas pengembangan guna mendukung pengembangan ekonomi wilayah;
9. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga kegiatan tersebut;
10. Pengembangan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan kegiatan wilayah baik dalam aspek fisik, sosial maupun ekonomi;
11. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata; dan;
12. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar 2018-2023. Sebagaimana yang termuat pada RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2011-2033 adalah sebagai berikut:

1. Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:
 - a. Rencana sistem perkotaan wilayah dan
 - b. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah, yang terdiri dari:

- 1) Rencana sistem jaringan prasarana utama, berupa pengembangan sistem jaringan transportasi darat yang meliputi:
 - a) Rencana pengembangan terminal, meliputi:
 - ❖ Pemantapan Terminal tipe B eksisting, meliputi Terminal Matesih dan Terminal Tawangmangu;
 - ❖ Rencana peningkatan tipe terminal dari Tipe C menjadi Tipe B, yaitu Terminal Karangpandan dan terminal Tuban Gondangrejo;
 - ❖ Rencana pembangunan terminal tipe B, yaitu Terminal Kebakkramat dan Terminal Induk Karanganyar di Papahan, Tasikmadu;
 - ❖ Pemantapan Terminal tipe C eksisting, meliputi Terminal Jungke, Terminal Jumapolo, Terminal Jatipuro, Terminal Jambangan, Terminal Jenawi dan Terminal Kemuning;
 - ❖ Rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono
 - ❖ Rencana pembangunan terminal angkutan barang di Kecamatan Jaten.
 - b) Rencana pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - ❖ Tawangmangu-Magetan;
 - ❖ Sragen-Karanganyar-Wonogiri;
 - ❖ Surakarta-Klodran(Colomadu)-Tuban(Gondangrejo);
 - ❖ Tuban-Wonosari-Mojosongo-Surakarta;
 - ❖ Pelayanan trayek berbasis masal di kawasan Kabupaten Karanganyar.
 - c) Rencana pengembangan prasaarana kelengkapan jalan
- 2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya
2. Rencana Pola Ruang Wilayah, meliputi:
 - a. Kawasan lindung, yang merupakan Kawasan perlindungan setempat yaitu RTH perkotaanyang terdapat di tiap ibukota kecamatan dan kawasan perkotaan dengan luas kurang lebih 3.528 (tiga ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar yang

ditetapkan dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang meliputi:

- 1) RTH publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan dan sungai dengan proporsi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) RTH privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 15% (lima belas persen).
- b. Kawasan budidaya, yang merupakan kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 26.632 (dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar, meliputi :
- 1) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 8.821 (delapan ribu delapan ratus dua puluh satu)hektar, meliputi :
 - a) Kecamatan Colomadu;
 - b) Kecamatan Gondangrejo;
 - c) Kecamatan Kebakkramat;
 - d) Kecamatan Jaten;
 - e) Kecamatan Tasikmadu;
 - f) Kecamatan Mojogedang;
 - g) Kecamatan Karanganyar;
 - h) Kecamatan Jumapolo;
 - i) Kecamatan Jumantono;
 - j) Kecamatan Jatipuro;
 - k) Kecamatan Jatiyoso;
 - l) Kecamatan Kerjo;
 - m) Kecamatan Karangpandan;
 - n) Kecamatan Matesih;
 - o) Kecamatan Jenawi;
 - p) Kecamatan Ngargoyoso;dan
 - q) Kecamatan Tawangmangu.
 - 2) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 17.811 (tujuh belas ribu delapan ratus sebalas)hektar, meliputi:
 - a) Kecamatan Colomadu;
 - b) Kecamatan Gondangrejo;

- c) Kecamatan Kebakkramat;
- d) Kecamatan Jaten;
- e) Kecamatan Tasikmadu;
- f) Kecamatan Mojogedang;
- g) Kecamatan Karanganyar;
- h) Kecamatan Jumapolo;
- i) Kecamatan Jumantono;
- j) Kecamatan Jatipuro;
- k) Kecamatan Jatiyoso;
- l) Kecamatan Kerjo;
- m) Kecamatan Karangpandan;
- n) Kecamatan Matesih;
- o) Kecamatan Jenawi;
- p) Kecamatan Ngargoyoso; dan
- q) Kecamatan Tawangmangu.

3. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah

Arahan pemanfaatan ruang wilayah merupakan indikasi program utama penataan ruang yang meliputi:

- a. Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten, merupakan perwujudan sistem prasarana yang meliputi:
 - 1) Transportasi
 - a) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas-ruas jalan pada kawasan-kawasan strategis seperti Colomadu, Pertumbuhan CepatPalur, Agropolitan dan Pariwisata;
 - b) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruas-ruas jalan pada daerah terpencil Lereng Gunung Lawu;
 - c) Pengembangan jaringan jalan tol;
 - d) Pengembangan prasarana dan sarana transportasi melalui pemeliharaan, peningkatan kualitas dan pembangunan prasarana dan sarana transportasi;
 - e) Pengembangan terminal melalui pemantapan terminal eksisting, peningkatan tipe terminal dari tipe C ke tipe B dan pembangunan terminal tipe B, tipe C, maupun terminal barang;
 - f) Pengembangan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - g) Peningkatan fungsi stasiun Palur dan Kaliyoso; dan

- h) Pembangunan prasarana penunjang jalan rel.
- b. Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten, yaitu perwujudan kawasan budidaya yang meliputi:
 - 1) Kawasan peruntukan permukiman, meliputi:
 - a) Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan; dan
 - b) Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan.
 - 2) Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
 - a) Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan;
 - b) Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana bumi perkemahan; dan
 - c) pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan

No	RTRW Kab Karanganyar	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KabKaranganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana struktur ruang wilayah	• Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2017 jumlah terminal tipe C sebanyak 10 unit); • Terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan kebutuhan; • Belum terpenuhinya target kebutuhan terminal tipe C sesuai dengan RTRW Kabupaten Karanganyar, yaitu rencana pembangunan terminal tipe C meliputi Terminal Jatiyoso, Terminal Mojogedang dan Terminal Jumantono;	• Keterbatasan anggaran pemerintah daerah dibandingkan kebutuhan yang ada untuk pemeliharaan/ revitalisasi terminal	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan transportasi yang nyaman dan aman bagi masyarakat; • Antusiasme masyarakat terhadap angkutan umum massal yang layak dan nyaman
2	Rencana Pola Ruang Wilayah	• Penanganan kawasan kumuh belum optimal, diketahui luasan kawasan kumuh pada tahun 2017 masih sebesar 59,7 Ha; • Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan/ permukiman; • Menurunnya kualitas lingkungan perumahan/ permukiman sehingga berpotensi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru di perkotaan; • Belum optimalnya penyediaan pengelolaan RTH di lingkungan perumahan/ permukiman;	• Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni; • Belum terintegrasinya PSU di kawasan permukiman secara menyeluruh.	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat; • Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain; • Kebijakan nasional 100-0-100 dalam percepatan penanganan kawasan kumuh

E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis tersebut harus dikaitkan dengan muatan lingkungan berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2016.Isu strategisdalam KLH untuk Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

TPB Pilar Lingkungan	Isu Strategis dari Target TPB Yang Belum Tercapai/ Belum Menjadi Target	Isu Strategis Terkait Kondisi Lingk Hidup
Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	Perlunya RTH perkotaan	• Emisi GRK dari sektor transportasi tertinggi kontribusinya mencapai 359,6 Gg CO2e atau 14,3% dari total emisi

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar, 2019

Berdasarkan SPM yang tertuang dalam TPB yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota, maka berikut adalah telaah terhadap indikator TPB yang terkait dengan SPM urusan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 3.9
Isu Strategis Standart Pelayanan Minimum

TPB SPM	Isu strategis dari target TPB Yang Menjadi SPM yang belum tercapai/ belum menjadi target
Perumahan Rakyat	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar, 2019

Rekomendasi terhadap capaian TPB dengan upaya tambahan merupakan upaya yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mencapai target yang diamanatkan di dalam TPB yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berikut adalah rekomendasi pencapaian target TPB dan peningkatan kondisi lingkungan hidup.

Tabel 3.10
Alternatif dan Rekomendasi Skenario Dengan Upaya Tambahan
dan Rekomendasi Untuk Daya Dukung dan Daya Tampung

No	Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu Strategis	Rekomendasi 2021
Tujuna 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
11.1	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh	• Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau belum terpenuhi	• Peningkatan akses rumah terhadap hunian yang layak dan terjangkau; • Bekerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam peningkatan rumah layak dan terjangkau

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar, 2019

Tabel 3.11
Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan

No	Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KabKaranganyar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh	• Belum optimalnya penyediaan pengelolaan RTH di lingkungan perumahan/ permukiman; • Akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau belum terpenuhi	• Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni; • Belum terintegrasinya PSU di kawasan permukiman secaramenyeluruh.	• Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat; • Banyak sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain; • Kebijakan nasional 100-0-100 dalam percepatan penanganan kawasan kumuh

F. Penentuan Isu-isu Strategis

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan prima atas kinerja pemerintah serta berbagi kebijakan yang dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggung jawaban instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan ekonomis.

Berkaitan dengan peran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perhubungan dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyediaan transportasi massa yang murah, nyaman dan terkoneksi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalulintas;
3. Kurangnya penyediaan fasilitas perlengkapan perhubungan (sarana dan prasarana)
4. Penanganan kawasan kumuh belum optimal;
5. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum (PSU) di perumahan dan lingkungan permukiman
6. Belum optimalnya penanganan RTLH;
7. Masih rendahnya PSU perumahan yang belum bersertifikat.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya maka visi dan misi tersebut harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa penetapan tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan ini maka Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar telah mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1(satu) sampai 5(lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar selama tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : 1. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.

Sasaran yang dicapai dari tujuan ini adalah:

- Sasaran : 1. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
2. Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman;
3. Menurunnya luasan permukiman kumuh;
4. Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat.

Untuk lebih lengkapnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan pelayanan transportasi darat		Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat di kali 100	%	6	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	Jumlah ijin trayek yang direkomendasi dibagi jumlah ijin trayek keseluruhan dikali 100	%	71,43	72	75	77	78	80
2.	Meningkatkan kualitas perumahan, kawasan permukiman dan penanganan pertanahan		Persentase perumahan dan permukiman yang tertata sesuai standart	Luas area permukiman yang tertata dibagi luas permukiman keseluruhan dikali 100	%	1	1	2	3	4	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
							2019	2020	2021	2022	2023
		Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk	rasio	0,24	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40
		Menurunnya luasan permukiman kumuh	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh di perkotaan kali 100	%	1,8	1,2	0,6	0,5	0,4	0,3
		Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat	Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	Jumlah PSU perumahan yang belum bersertifikat dibagi jumlah PSU perumahan keseluruhan dikali 100	%	NA	5	6	7	9	10

Sumber: Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat melalui reformasi birokrasi, pengembangan fasilitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan fasilitas alih moda yang memadai dan meremajakan armada angkutan umum;
2. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan rehab rumah;
3. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan melalui penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya; pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan peremajaan lingkungan kumuh.

B. Kebijakan

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas alih moda yang memadai

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan fokus pada pemberian bantuan rehab rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan;
3. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan peremajaan lingkungan kumuh

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel. 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan pelayanan transportasi darat	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi darat melalui reformasi birokrasi, pengembangan fasilitas perhubungan, penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan fasilitas alih moda yang memadai dan meremajakan armada angkutan umum.	Meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat dengan fokus pada penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas alih moda yang memadai
2	Meningkatkan kualitas perumahan, kawasan permukiman dan penanganan pertanahan	Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni dan pemberian bantuan rehab rumah	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dengan fokus pada pemberian bantuan rehab rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan golongan rentan
		Menurunnya luasan kawasan kumuh	Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan melalui penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya; pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan peremajaan lingkungan kumuh

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			dan peremajaan lingkungan kumuh	
		Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat	Percepatan sertifikasi PSU perumahan dengan PSU perumahan; pentertiban administrasi PSU perumahan dankerjasama dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya pensertifikatan PSU perumahan.	Percepatan sertifikasi PSU perumahan daerah dengan fokus pada penertiban administrasi PSU perumahan dan meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya pensertifikatan PSU perumahan serta pengembang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang (2018-2023) diuraikan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. Penyediaan alat tulis kantor;
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
9. Penyediaan peralatan rumah tangga;
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
11. Penyediaan makanan dan minuman;
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas operasional;
2. Pengadaan peralatan gedung kantor;
3. Pengadaan Mebeleur;
4. Pengadaan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat;
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

8. Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur;
9. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi.

C. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan SDM

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD;
2. Penyusunan produk hukum daerah (perda rumah susun; perda pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh; perda pengelolaan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat);
3. Penyusunan Renstra OPD.

E. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat;
2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL;
3. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan
4. Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran;
5. Pengembangan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perhubungan
6. Pengadaan Mobil Operasional Bidang Perhubungan;
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan;
8. Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast;
9. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast;
10. Pengadaan Truck Crane (Mobil Tangga Listrik);
11. Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah;
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

F. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor;
3. Rehabilitasi/pemeliharaan APILL;
4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas CFD;
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan Kereta Api
7. Pengaturan, pengendalian dan penataan kegiatan perparkiran;
8. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana pendukung informasi perhubungan;

G. Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

1. Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan;
2. Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas;
3. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan teladan;
4. Penyelenggaraan posko angkutan lebaran;
5. Pelayanan angkutan mudik lebaran;

H. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas;
2. Pengadaan dan pemasangan fasilitas penunjang keselamatan jalan.

I. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor;
2. Pendukung operasional pengujian kendaraan bermotor;
3. Pengadaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
4. Peningkatan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)

J. Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas

1. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas;
2. Penjagaan perlintasan palang kereta api;
3. Operasi penertiban dan pemeriksaan kendaraan;
4. Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L;

5. Patroli dan pengawasan lalu lintas;
6. Penyelenggaraan Karanganyar *car free day*;
7. Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas
8. Penyelenggaraan Forum LLAJ;
9. Pemantauan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas;
10. Penyelenggaraan WTN;
11. Sosialisasi Ketertiban Berlalu Lintas;
12. Pengkajian dan Pengendalian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas;
13. Penyusunan Tatralok Kabupaten Karanganyar;
14. Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
15. Penyusunan database kinerja lalulintas.

K. Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman

1. Pemeliharaan lampu penerangan jalan se Kab. Karanganyar;
2. Pengadaan dan pemasangan lampu PJU dan *high mast*;

L. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pemeliharaan taman dan monumen;
2. Pengadaan sarana dan prasarana untuk perawatan taman;
3. Pengadaan mobil tangga pemangkas pohon;
4. Pemeliharaan turus jalan kota;
5. Pengadaan pohon turus jalan kota;
6. Pemeliharaan taman air mancur;
7. Penataan lingkungan alun-alun Kabupaten Karanganyar;
8. Pengadaan tanaman hias;

M. Program Pengembangan Perumahan

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan;
2. Biaya operasional monitoring dan evaluasi PSU perumahan Kab. Karanganyar;
3. Biaya operasional bantuan perumahan;
4. Pemutakhiran data RTLH;

5. Biaya operasional kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
6. Biaya operasional penyerahan fasos fasum perumahan di Kabupaten Karanganyar;
7. Biaya operasional peningkatan kualitas kawasan permukiman;
8. Fasilitas koordinasi kotaku;
9. Identifikasi kawasan kumuh;
10. Perencanaan teknis perumahan;
11. Pemeliharaan PSU perumahan;
12. Fasilitas bantuan perumahan swadaya (DAK);
13. Biaya operasional bantuan RTLH;
14. Pembangunan kawasan kumuh;
15. Pendampingan program bantuan perumahan;
16. Bantuan sosial perumahan akibat bencana alam;
17. Program GIS (*Geography Information System*).

N. Program pengelolaan areal pemakaman

1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman;
3. Peningkatan operasional pengelolaan dan pendataan pemakaman;
4. Pengadaan sarana dan prasarana pemakaman.

O. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1. Fasilitas pengurusan penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum dan sosial perumahan dari pengembang ke pemerintah daerah;
2. Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah;

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
Meningkatkan kinerja pelayanan dan pengelolaan perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan																		
	Survey Kepuasam Masyarakat					Nilai	77,2	78,20		79,20		80,20		81,20		82,20		
	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
	Nilai SAKIP					Nilai	65,50	65,60		65,70		65,73		65,74		65,75		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								426.690		475.000		579.500		687.000		682.000	
						Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100		100		100		100		100	
	Penyediaan jasa surat menyurat					Terpenuhinya Pelayanan jasa surat menyurat	bulan	12	0	4.500	12	5.000	12	5.000	12	5.000	12	5.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik dan telephone	bulan	12	12	132.000	12	130.000	12	140.000	12	150.000	12	150.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Terpenuhinya kebutuhan pajak kendaraan dan service rutin kendaraan dinas/operasional	bulan	12	12	25.400	12	20.000	12	35.000	12	51.000	12	51.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor					Terpenuhinya Penyediaan jasa	bulan	12	12	2.000	12	40.000	12	50.000	12	60.000	12	60.000

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
					kebersihan kantor												
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan / service peralatan kerja	bulan	12	12	12.000	12	18.000	12	20.000	12	35.000	12	35.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pendukung operasional kantor	bulan	12	76	20.000	85	25.000	90	35.000	100	45.000	100	45.000
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, foto copy dan penjilidan	bulan	12	12	15.400	12	10.000	12	20.000	12	30.000	12	30.000
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor	bulan	12	12	3.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000	12	10.000
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya sarana dan prasarana kebersihan kantor	bulan	12	12	0	12	3.000	0	0	12	5.000	0	0
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	bulan	12	12	4.340	12	4.000	12	4.500	12	6.000	12	6.000
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum rapat	bulan	12	12	33.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah	bulan	12	12	175.050	12	140.000	12	190.000	12	220.000	12	220.000
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					306.310		700.000		1.710.000		1.900.000		755.000
					Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%		100		100		100		100		100	
				Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	unit/mobil		0	0	0	150.000	2	1.100.000	2	1.300.000	0	150.000
						unit/motor		0	0	5	-	0		3		5	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai	printer		2	95.310	2	70.000		75.000	2	80.000	3	80.000
						AC		3		2		2		3		3	
						Mobile file		1		1		1		1		1	
						Handy talky		2		0		0		0		2	
						laptop		0		2		3		2		2	
						PC dekstop		0		2		2		5		3	
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	buah		0	0	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000
				Pengadaan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pengadaan Aplikasi	aplikasi		0	0	0	0	1	50.000	0	0	0	0
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit		0	0	2	120.000	2	120.000	2	120.000	2	120.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas (BBM, ganti oli, dll)	bulan		12	156.000	12	150.000	12	150.000	12	160.000	12	160.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terwujudnya ruang kerja kantor yang memadai dan nyaman	bulan		0	0	12	25.000	12	25.000	12	30.000	12	30.000
				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan mebeluer	buah		0	0	0	0	12	5.000	12	5.000	12	5.000
				Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi	Jumlah peralatan komunikasi yang terpelihara	unit		5	55.000	7	85.000	7	85.000	8	105.000	10	110.000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					0		100.000		100.000		100.000		100.000
					Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%		0		100		100		100		100	
				Peningkatan SDM	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/ pelatihan/ bimtek	orang		0	0	12	100.000,00	12	100.000,00	12	100.000	12	100.000
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					152.049		270.000		270.000		270.000		270.000
					Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100		100		100		100		100	
				Penyusunan Pelaporan	Jumlah dokumen	dokumen	4	4	92.049	4	120.000	4	120.000	4	120.000	4	120.000

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
				Pengelolaan Keuangan SKPD	laporan pengelolaan keuangan PD													
				Penyusunan Renstra OPD	Jumlah dokumen Renstra OPD	dokumen	0	1	60.000									
				Penyusunan produk hukum daerah	Tersedianya produk hukum perhubungan	Perbup/perda	0	1	0	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	
					Tersedianya produk hukum perumahan	Perbup/perda	0	0		1		1		1		1		
Meningkatkan pelayanan transportasi darat																		
	Persentase layanan angkutan darat					%	6	6		7		8		9		10		
	Meningkatnya pelayanan transportasi darat yang aman dan nyaman bagi masyarakat																	
	Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan					%	71,43	72		75		77		78		80		
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan				674.244		6.792.440		6.209.330		7.232.392		8.444.272		
					Persentase Terminal Tipe C yang sesuai dengan Standar	%	10	10		20		30		40		50		
					Persentase pemasangan rambu-rambu	%	55	65		71		77		83		89		
					Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	%	125	134		141		148		156		163		

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah bulan terpenuhinya peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	bulan	6	12	674.244	12	821.070	12	985.280	12	1.182.340	12	1.418.810
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan APILL	Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	0	0	12	291.740	12	362.090	12	399.500	12	458.810
				Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan	Jumlah CCTV di setiap simpang APILL dan lokasi tertentu	unit	5	0	0	2	200.000	3	300.000	4	400.000	5	500.000
				Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik	bulan	12	0	0	12	85.000	12	95.000	12	105.000	12	115.000
				Pengembangan Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah aplikasi GIS	aplikasi	0	0	0	1	30.830	1	41.000	1	53.600	1	60.710
				Pengadaan Mobil Operasional Bidang Perhubungan	Tersedianya kendaraan operasional APILL/ Rambu dan petugas pengelola parkir	unit	0	0	0	1	550.000	1	550.000	1	550.000	1	550.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan	Terpenuhinya pemeliharaan sarana pendukung informasi perhubungan di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	0	0	12	10.000	12	17.000	12	17.000	12	17.000

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast	Terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	0	0	12	520.800	12	625.000	12	750.000	12	825.000
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dan High Mast	Tersedianya lampu PJU dan High Mast yang digunakan untuk menambah keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar	paket	1	0	0	1	2.250.000	1	2.699.960	1	3.239.952	1	3.962.942
				Pengadaan Truck Crane (Mobil Tangga Listrik)	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	unit	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0
				Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah	Terbayarnya sewa dan kompensasi tanah oleh Pemkab	lokasi		0	0	1	33.000	1	34.000	1	35.000	1	36.000
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	paket	1	0	0	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					386.525		375.000		390.000		410.000		440.000
					Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	%	50	50		52		53		55		60	

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan yang terpenuhi kalibrasi dan pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	unit	9	9	158.500	9	160.000	9	170.000	9	180.000	9	190.000
				Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Terpenuhinya pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	bulan	12	0	0	12	45.000	12	50.000	12	60.000	12	80.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Pendukung Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah fasilitas pendukung keselamatan jalan yang terpelihara dengan baik	unit	0	0	0	15	60.000	15	60.000	15	60.000	15	60.000
				Rehabilitasi, Pemeliharaan Fasilitas CFD	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas CFD	set	0	0	0	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Kereta Api	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perlindungan Kereta Api	unit	0	0	0	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000
				Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL	Terpenuhinya pemeliharaan APILL di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	12	134.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan Perparkiran	Terpenuhinya administrasi retribusi parkir tertata dengan baik	bulan	12	12	77.025	0	0	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Pendukung Informasi Perhubungan	Terpenuhinya pemeliharaan sarana pendukung informasi perhubungan di Kabupaten Karanganyar	bulan	12	12	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pogram peningkatan pelayanan angkutan					702.975		843.570		1.012.280		1.214.740		1.457.690
					Jumlah orang melalui terminal per tahun	orang	2.050.000	2.060.000		2.080.000		2.100.000		2.120.000		2.150.000	
				Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Jumlah bulan terpenuhinya administrasi ijin bidang perhubungan	bulan	12	12	252.143	12	260.000	12	290.000	12	350.000	12	420.000
				Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah terselenggara nya sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kali	0	0	0	0	0	5	50.000	5	50.000	6	87.690
				Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah terselenggara nya Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Kali	0	0	0	0	0	1	12.280	1	84.740	1	100.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran	Jumlah posko angkutan lebaran guna membantu memperlancar mudik lebaran tiap tahunnya	posko	0	0	0	2	35.000	2	50.000	2	60.000	2	100.000
				Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran	Jumlah bus yang digunakan pelayanan angkutan mudik lebaran	Unit	31	32	450.832	35	548.570	43	610.000	49	670.000	55	750.000
				Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas					468.116								
					Pemasangan rambu-rambu	%	N/A	65									
				Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Jumlah pengadaan dan pemasangan traffic light	paket	0	1	99.045								
				Pengadaan dan Pengecatan Zona Selamat Sekolah	Jumlah pengadaan	paket	0	1	75.000								
				Pengadaan Traffic Barrier	Jumlah pengadaan traffic barrier	paket	0	1	100.000								
				Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penunjang Keselamatan Jalan	Jumlah CCTV di setiap simpang APILL	unit	5	2	194.071								
				Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor					928.500		800.000		836.000		841.000		1.046.000
					Persentase kepemilikan	%	40	59		62		64		67		70	

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
					KIR angkutan umum												
				Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pengadaan alat pengujian	unit	0	0 -	0	1	200.000	1	180.000	1	180.000	1	280.000
				Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan terpenuhinya operasional pengujian kendaraan bermotor	bulan	12	12	658.000	12	320.000	12	320.000	12	320.000	12	320.000
				Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah bulan terpenuhinya fasilitas kelengkapan administrasi pengujian kendaraan bermotor	bulan	12	12	88.000	12	80.000	12	96.000	12	81.000	12	171.000
				Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM PKB)	Jumlah Aplikasi SIM PKB yang ditingkatkan	aplikasi	1	1	182.500	2	200.000	2	240.000	2	260.000	2	275.000
				Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas					453.000		995.000		871.000		886.000		901.000
					Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	%	N/A	1		1		2		2		3	
				Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah kegiatan pelaksanaan kampanye keselamatan lalu lintas	kegiatan		0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api	Terpenuhinya penjagaan perlintasan palang kereta api	bulan	12	12	127.000	12	140.000	12	140.000	12	140.000	12	140.000
				Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan	Jumlah Pelaksanaan operasi gabungan dengan Polres	kali	12	12	30.500	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000
				Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas/P3L	Jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas pada ruas jalan Kabupaten Karanganyar	kali	120	120	50.000	150	80.000	150	80.000	150	80.000	150	80.000
				Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas	Jumlah pelaksanaan patroli pengawasan lalu lintas	kali	0	0	0	50	30.000	50	36.000	50	36.000	50	36.000
				Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan karanganyar car free day selama 4 jam	kali	47	47	152.000	47	200.000	47	200.000	47	200.000	47	200.000
				Pemilihan pelajar pelopor lalu lintas	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan	kegiatan	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
				Penyelenggaraan Forum LLAJ	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan rapat koordinasi pemecahan permasalahan LLAJ	bulan	9	9	30.500	12	35.000	12	35.000	12	35.000	12	35.000

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dokumen andalalin	kali	12	13	43.000	14	40.000	14	40.000	14	40.000	14	40.000
				Penyelenggaraan WTN	Jumlah pelaksanaan lomba Wahana Tata Nugraha	keg	1	1	20.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	25.000
				Sosialisasi Ketertiban Berlalu Lintas	Jumlah Sosialisasi Ketertiban Berlalu Lintas	kali	0	0		25	25.000	25	30.000	25	30.000	25	30.000
				Pengkajian dan Pengendalian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Pengkajian dan Pengendalian Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas	lokasi	0	0	0	6	60.000	6	60.000	6	60.000	6	60.000
				Penyusunan Tatralok Kabupaten Karanganyar	Jumlah dokumen Tatralok Kabupaten Karanganyar	dokumen	0	0	0	1	150.000	0	0	0	0	0	0
				Penyusunan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah dokumen Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kabupaten Karanganyar	dokumen	0	0	0	1	40.000	1	50.000	1	60.000	1	70.000
				Penyusunan Database Kinerja Lalu Lintas	Jumlah dokumen database kinerja lalu lintas	dokumen	0	0	0	1	35.000	1	40.000	1	45.000	1	50.000

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
Meningkatkan kualitas perumahan, kawasan permukiman dan penanganan pertanahan																	
	Persentase perumahan dan permukiman yang tertata sesuai standart					%	1	1		2		3		4		5	
	Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman																
	Rasio rumah layak huni						0,24	0,25		0,28		0,30		0,35		0,45	
	Menurunnya luasan permukiman kumuh																
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan					%	1,8	1,2		0,6		0,5		0,4		0,3	
	Meningkatnya PSU perumahan yang bersertifikat																
	Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat					%	N/A	5		6		7		9		10	
	Program Pengembangan Perumahan								464.875		1.600.000		1.695.000		1.470.000		1.515.000
	Presentase penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh					%	0,12	0,11		0,10		0,09		0,08		0,07	
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan					kali	0	0	0	6	30.000	0	0	0	0	0	0
Biaya Operasional Monitoring dan Evaluasi PSU Perumahan Kab Karanganyar					lokasi	0	0	0	12	25.000	12	30.000	12	35.000	12	40.000	
Biaya Operasional Bantuan Perumahan					kecamatan	0	0	0	17	20.000	17	25.000	17	30.000	17	35.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pemutakhiran Data RTLH	Jumlah kecamatan pemutakhiran data RTLH di Kab. Karanganyar	kec	1	1	65.575	8	300.000	8	300.000	0	0	0	0
				Biaya Operasional Kegiatan peningkatan kulaitas Pemukiman Kumuh	Jumlah daerah yang mendapat bantuan permukiman kumuh	kec	0	0	0	6	50.000	6	50.000	6	50.000	6	50.000
				Biaya Operasional Penyerahan Fasos dan Fasum Perumahan di Kabupaten Karanganyar	Terpenuhinya penyerahan fasos fasum perumahan di Kab. Karanganyar	bulan	0	0	0	12	25.000	12	30.000	12	35.000	12	50.000
				Biaya Operasional Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman	Terpenuhinnya kegiatan bantuan peningkatan kualitas kawasan pemukiman	bulan	0	0	0	12	25.000	12	30.000	12	35.000	12	50.000
				Fasilitasi Koordinator Kotaku	Terpenuhinnya kegiatan bantuan KOTAKU	bulan	0	0	30.000	12	25.000	12	30.000	12	35.000	12	40.000
				Identifikasi Kawasan Kumuh	Dokumen identifikasi kawasan kumuh di Kab. Karanganyar	dokumen	1	1	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Perencanaan Teknis Perumahan	Terpenuhinnya kegiatan perencanaan teknis perumahan	bulan	12	12	91.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000
				Pemeliharaan PSU Perumahan	Jumlah bulan terpenuhinnya kegiatan pemeliharaan	bulan	12	12	56.050	12	200.000	12	200.000	12	200.000	12	200.000

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
					PSU Perumahan												
				Fasilitasi Program Bantuan Perumahan Swadaya (DAK)	Pelaksanaan fasilitasi program bantuan perumahan swadaya kepada masyarakat yang membutuhkan	bulan	0	9	131.250	0	0	0	0	0	0	0	0
				Biaya Operasional Bantuan RTLH	Terpenuhinya kegiatan biaya operasional bantuan RTLH	bulan	0	0	0	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000
				Pembangunan Kawasan Kumuh	Lokasi peningkatan kualitas kawasan kumuh	lokasi	0	0	0	1	200.000	2	400.000	2	400.000	2	400.000
				Pendampingan Program Bantuan Perumahan	Terpenuhinya pendampingan program bantuan perumahan	bulan	0	0	0	12	100.000	12	100.000	12	150.000	12	150.000
				Bantuan Sosial Perumahan Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemkab	KK yang mendapat bantuan RLH akibat Terkena Relokasi Program Pemkab	KK	0	0	0	7	150.000	7	150.000	7	150.000	7	150.000
				Bantuan Sosial Perumahan Akibat Bencana Alam	KK yang mendapat bantuan RLH akibat bencana alam	KK	0	0	0	7	150.000	7	150.000	7	150.000	7	150.000

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pengadaan Aplikasi SIM PSU Perumahan	Jumlah aplikasi	aplikasi	0	1	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Fasilitasi Pelaksanaan RTLH	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan RTLH	bulan	0	12	50.000	0	0	12	50.000	12	50.000	12	50.000
				Pengadaan dan Pelatihan Geographic Information System (GIS)	Aplikasi sistem informasi geografi (Geographic Information System)	aplikasi	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0
				Program pengelolaan areal pemakaman					89.730		258.703		258.573		269.430		235.050
					Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	rasio	859,30	860,00		861,00		862,00		863,00		864,00	
				Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman yang memadai	lokasi	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	54.050
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Tempat pemakaman yang dipelihara dengan baik	lokasi	0	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0
				Peningkatan Operasional Pengelolaan dan Pendataan Pemakaman	Terpenuhinya pengelolaan pemakaman yang baik	bulan	12	12	89.730	12	98.703	12	108.573	12	119.430	12	131.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Sarana dan prasarana pemakaman	lokasi	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
				Program penataan penguasaan, pemilikan,				112.000	112.000		101.400		127.280		158.536		196.243

Tujuan	Indikator or Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				penggunaan dan pemanfaatan tanah													
					Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	%	N/A	5		6		7		8		9	
				Fasilitasi Pengurusan Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Sosial Perumahan dari Pengembang ke Pemda	Fasilitasi program penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah	bulan		12	80.000	12	101.400	12	127.280	12	158.536	12	196.243
				Pembayaran sewa dan kompensasi tanah yang dipergunakan oleh pemerintah daerah	Terbayarnya sewa dan kompensasi tanah oleh pemkab	lokasi		1	32.000								
				Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					1.436.050		3.430.000		1.985.000		3.390.000		2.145.000
					Persentase cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun, stadion, PSU perumahan, taman tugu batas kota)	%	32,44	33,44		34,44		35,44		37		39	
				Pemeliharaan Taman dan Monumen	Taman yang terpelihara dengan baik	lokasi	14	14	1.236.050	14	1.300.000	14	1.300.000	14	1.400.000	14	1.450.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk Perawatan Taman	Sarana dan prasarana yang digunakan untuk perawatan taman-taman	unit	0	3	50.000	6	250.000	5	100.000	5	100.000	5	100.000
				Pengadaan Mobil Tangga Pemangkas Pohon	Pengadaan kendaraan pemangkas pohon	unit	0	0	0	1	1.300.000	0	0	1	1.300.000	0 -	0
				Pemeliharaan Turus Jalan Kota	Terpenuhinya pemeliharaan turus jalan kota	bulan	0	0	0	12	30.000	12	35.000	12	40.000	12	45.000
				Pengadaan pohon turus jalan	Jumlah pohon turus jalan yang dibeli	batang	NA	125	100.000	225	200.000	225	200.000	225	200.000	225	200.000
				Pemeliharaan Taman Air Mancur	Pemeliharaan taman air mancur	lokasi	0	0	0	2	200.000	2	200.000	2	200.000	2	200.000
				Penataan Lingkungan Alun-Alun Kabupaten Karanganyar	Penataan alun-alun yang indah dan nyaman	lokasi	0	0	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
				Penyusunan DED Taman Adipura Kabupaten Karanganyar	Jumlah dokumen DED	dokumen	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
				Pengadaan Tanaman Hias	Jumlah tanaman hias	batang	0	0	0	200	50.000	200	50.000	200	50.000	200	50.000
				Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman					2.659.000								
					Persentase PJU dalam kondisi baik	%		70									

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
								Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
				Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab. Karanganyar	Terpeliharanya kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Karanganyar	bulan		12	359.000								
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU dan High Mast	Tersedianya lampu PJU dan High Mast yang digunakan untuk menambah keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar	paket		1	2.000.000								
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU	Jumlah lampu PJU yang digunakan untuk menambah keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar	paket		1	200.000								
				Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias	Jumlah lampu hias	paket		1	100.000								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyardalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyarselama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparaturdi lingkungan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabuaten Karanganyar.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan dan Perumahan Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Perhubungan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat di kali 100	%	6	6	7	8	9	10
Persentase rekomendasi ijin trayek (perdesaan/ perkotaan) yang dikeluarkan	Jumlah ijin trayek yang direkomendasi dibagi jumlah ijin trayek keseluruhan dikali 100	%	71,43	72	75	77	78	80
Persentase terminal type C sesuai standart	Jumlah terminal C sesuai standart di bagi jumlah terminal C keseluruhan di kali 100	%	10	10	20	30	40	50
Persentase pemasangan rambu-rambu	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100	%	NA	65	71	77	83	89
Persentase capaian PAD dari parkir (tepi jalan kabupaten)	Jumlah capaian PAD parkir tepi jalan dibagi Target PAD parkir tepi jalan dikali 100	%	125	134	141	148	156	163
Persentase prasarana dan sarana fasilitas LLAJ dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dan sarana LLAJ dalam kondisi baik dibagi Jumlah prasarana dan sarana fasilitas LLAJ	%	50	50	52	53	55	60
Jumlah orang melalui terminal per tahun	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang/ tahun	2.050.000	2.060.000	2.080.000	2.100.000	2.120.000	2.150.000
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada Tahun n dibagi	%	40	59	62	64	67	70

Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	jumlah angkutan umum pada Tahun n dikali 100							
Persentase kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang	Jumlah kendaraan pribadi yang memenuhi ambang batas emisi gas buang dibagi jumlah kendaraan pribadi yang melakukan tes emisi gas buang dikali 100	%	NA	1	1	2	2	3
Persentase perumahan dan permukiman yang tertata sesuai standart	Luas area permukiman yang tertata dibagi luas permukiman keseluruhan dikali 100	%	NA	1	2	3	4	5
Rasio rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk	rasio	0,24	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani dibagi luas permukiman kumuh di perkotaan kali 100	%	1,8	1,2	0,6	0,5	0,4	0,3
Presentase penanganan Lingkungan Pemukiman Kumuh	Luas lingkungan kumuh yang ditangani dibagi luas wilayah dikali 100	%	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08	0,07
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dibagi Jumlah penduduk x 1000	rasio	859,30	860	861	862	863	864
Persentase PSU perumahan yang telah bersertifikat	Jumlah PSU perumahan yang bersertifikat dibagi jumlah PSU perumahan keseluruhan dikali 100	%	NA	5	6	7	9	10
Persentase cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan (taman kota, alun-alun, stadion, PSU	Jumlah RTH yang ditangani di bagi jumlah RTH keseluruhan dikali 100	%	32,44	33,44	34,33	35,44	37	39

Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
perumahan, taman tugu batas kota)								

Sumber: RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023

BAB VII PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Karanganyar wajib berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO